

Mengatasi Kesenjangan Digital: Mewujudkan Inklusi dan Partisipasi Masyarakat Indonesia Melalui E-Government

Annaera Arastha¹, Bunga Almadinah², Najwa Aqilah Ferrysca³, Nurdin⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
annaeraa@gmail.com¹, bungaalmadinah18@gmail.com², ferryscaaf@gmail.com³, nurdin.fisip@upnvj.ac.id⁴

Abstract

This research aims to analyze how E-Government attempts to overcome the digital divide and increase community participation in Indonesia with existing obstacles. This research covers the digital divide in society, the role of government in overcoming these things through E-Government, and factors in implementing E-Government. The method used is a qualitative approach with literature analysis studies on relevant studies. The research results show that E-Government in Indonesia still needs to pay more attention to its implementation, processes and service structure because there are still obstacles in the use of E-Government which causes the absence of digital in society. The government has an important role in increasing the efficiency of e-government and reducing the digital divide in society.

Keywords: Gap; Digital; E-Government

PENDAHULUAN

Perkembangan TIK telah melahirkan sebuah inovasi berupa E-Government atau pemerintahan elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di lembaga pemerintahan. Menurut World Bank, bahwa E-Government adalah penggunaan teknologi informasi seperti WAN, internet, dan komputasi seluler oleh institusi pemerintah yang memiliki kecakapan untuk mengkonversikan relasi mereka dengan warga negara, pelaku usaha, dan institusi pemerintah lainnya. Pengembangan E-Government juga merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta menjangkau akses pelayanan publik yang luas. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* diprediksikan akan menggantikan fasilitas layanan publik dengan mesin sehingga menumbuhkan organisasi yang efektif (Sugiono, 2021). Teknologi tersebut meliputi WAN, e-mail, perangkat komputasi seluler, internet, dan sejumlah teknologi lainnya yang digunakan untuk mendistribusikan informasi dan menyediakan layanan elektronik dalam berbagai bentuk (Azizah & Najicha, 2022). Dalam hal ini, pemerintahan yang berbasis elektronik diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Namun, problematika mengenai kesenjangan digital (*digital device*) menjadi hambatan dalam implementasi E-Government di Indonesia. Menurut Soomro *et al.* (2020) bahwa kesenjangan digital (*digital device*) merupakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap TIK yang memadai dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap TIK. Kesenjangan digital merupakan isu yang rumit yang berasal dari berbagai faktor termasuk perbedaan ekonomi sosial, lokasi geografis, usia, ras, dan jenis kelamin (Haniko *et al.*, 2023). Faktor utama penyebab terjadinya kesenjangan digital adalah pembangunan infrastruktur yang kurang merata. Hal paling menonjol adalah kesenjangan pembangunan yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Secara realita, pembangunan infrastruktur di perkotaan jauh lebih maju dibandingkan dengan di pedesaan sehingga masyarakat pedesaan sering kesulitan dalam mengakses informasi.

Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur teknologi digital yang kurang merata sering menjadi tantangan yang dihadapi bagi kemajuan di pedesaan. Berdasarkan tujuan SDGs atau pembangunan berkelanjutan dari PBB, problematika mengenai kesenjangan digital merupakan salah satu penghambat dalam pedesaan yang modern. Kapasitas sumber daya manusia yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi seperti di daerah juga menjadi hambatan dalam pengembangan E-government yang efektif. Regulasi terkait E-Government juga masih belum optimal terutama respon dari pemerintah dapat dikatakan kurang cepat tanggap.

Menurut laporan Index (EV-DCI) pada tahun 2023, bahwa skor daya saing digital tertinggi diraih oleh provinsi DKI Jakarta dengan jumlah skor mencapai 76,6. Selanjutnya, peringkat kedua diraih oleh provinsi Jawa Barat dengan jumlah skor 62,2, peringkat ketiga diraih oleh provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan jumlah skor 23,3, pada peringkat paling akhir terdapat provinsi Papua Tengah dengan jumlah skor 24,9 (EV-DCI, 2024). Penyebab provinsi Papua Tengah berada di posisi terendah karena adanya pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kota yang padat penduduk di Indonesia serta provinsi di pulau Jawa menduduki posisi paling teratas. Di sisi lain, kota-kota di luar pulau Jawa juga menyaingi provinsi di Pulau Jawa. Urutan peringkat 10 provinsi tersebut yakni (1) DKI Jakarta, (2) Jawa Barat, (3) Jawa Timur, (4) DI Yogyakarta, (5) Banten, (6) Bali, (7) Kepulauan Riau, (8) Kalimantan Timur, (9) Sumatera Utara, dan (10) Jawa Tengah. EV-DCI 2024 telah menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun 2023, yakni di tahun 2023 sebesar 52,4 dan di tahun 2024 sebesar 60,4.

Sedangkan, pada era globalisasi yang dicirikan dengan kemajuan teknologi informasi telah membuat eksistensi dari internet menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia modern. Penggunaan internet telah memberikan manfaat yang luas sehingga menjadi daya tarik masyarakat. Dalam hal ini, internet merupakan sarana yang dapat menghubungkan antar individu untuk melakukan komunikasi dan mencari informasi secara *real time*. Handphone merupakan salah satu barang elektronik yang dapat memungkinkan masyarakat untuk mengakses internet. Fasilitas handphone yang sangat beragam seperti akses video, kamera, game, musik, browsing telah menjadi daya tarik bagi masyarakat di masa kini sehingga membuat daya beli konsumen terhadap handphone tergolong tinggi. Menurut laporan data survey yang dilakukan oleh Hootsuite pada bulan Januari tahun 2024 terdapat 353,8 juta jiwa penduduk Indonesia yang terhubung dengan perangkat mobile (Hootsuite, 2024). Hal ini telah menunjukkan bahwa pengguna handphone di Indonesia cukup banyak.

Isu terkait kesenjangan digital akan mempengaruhi keberhasilan implementasi E-Government yang seharusnya dapat berjalan dengan efektif justru menjadi terganggu. Hal ini juga akan menghalangi partisipasi digital masyarakat yang justru akan semakin memperluas ketidaksetaraan. Menurut Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah terus menggerakkan operator telekomunikasi untuk aktif membangun infrastruktur jaringan hingga ke daerah terpencil. Pemerintah juga ikut serta dalam penyediaan jaringan backbone lewat proyek Palapa Ring serta satelit multifungsi Satria. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur digital tersebut diperlukan upaya yang kolaboratif antara pemerintah, pelaku bisnis, dan juga masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. Pada tahun 2022 yang berjudul Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19, hasil penelitiannya menyatakan bahwa adanya pandemi covid 19 memberikan dampak terhadap perkembangan teknologi digital di Indonesia. Terdapat sisi positif, di mana terjadinya percepatan perkembangan teknologi digital, namun masih terdapat masalah signifikan seperti kesenjangan antar wilayah. Kemudian, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nia Endri Wiranti dan Aldri Frinaldi pada tahun 2023 yang berjudul Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital, hasil penelitiannya menyatakan bahwa efisiensi pada teknologi di era digital harus diperhatikan dengan sebaik mungkin dan harus ditingkatkan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Renaldy Oktavianoor pada tahun 2020 yang berjudul Kesenjangan Digital Akibat Kondisi Demografis di Kalangan Masyarakat Rural, hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesenjangan digital yang terjadi di masyarakat rural disebabkan oleh akses internet yang masih kurang merata dan kurangnya kemampuan individu dalam menggunakan handphone.

Pada penelitian tersebut memiliki persamaan seperti lebih berfokus terhadap isu kesenjangan digital. Kemudian, perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu isu yang dibahas hanya fokus terhadap isu kesenjangan digital saja. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan lebih difokuskan lagi terhadap kesenjangan digital dalam implementasi E-Government. Hal ini, kebaharuan dari penelitian penulis akan mengisi keterbatasan pada penelitian terdahulu.

Problematika mengenai kesenjangan digital sangat menarik untuk diteliti mengingat hal tersebut menjadi urgensi yang harus diatasi. Dalam hal ini, E-Government berperan untuk meningkatkan inklusi dan partisipasi masyarakat sehingga dalam mencapai tujuan tersebut kesenjangan digital harus diatasi dengan serius agar implementasi E-Government dapat berjalan dengan selaras. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi kontribusi yang penting dalam memahami peran E-Government dan mengetahui bagaimana hubungan antara kesenjangan digital dengan E-Government.

METODE

Penelitian yang berjudul “Mengatasi Kesenjangan Digital: Peran E-Government dalam Meningkatkan Inklusi dan Partisipasi Masyarakat di Indonesia” ini berjalan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, kualitatif dan evaluatif berdasarkan kajian materi dan kepustakaan. Moleong (2007), yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih tepatnya untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan studi tentang perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan aktivitas subjek.

Penelitian kualitatif menurut David Williams (1995) adalah “Pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah”. Dalam penelitian kualitatif, definisi operasional lebih fokus pada deskripsi yang mendalam dan pemahaman konteks yang menghasilkan data berupa teks atau observasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Studi literatur menjadi hal pertama yang dilakukan dengan menganalisis literatur yang sudah ada untuk mengidentifikasi kerangka kerja teoritis, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait peran E-Government dalam inklusi dan partisipasi masyarakat di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari literatur atau artikel dari buku, jurnal atau website terkait. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata daripada gambar.

HASIL DAN DISKUSI

a. Strategi dan Peran Pemerintah untuk Mengatasi Kesenjangan Digital dan Mendorong Inklusi Digital melalui E-Government

Pada era global yang semakin di dominasi oleh teknologi dan konektivitas, memiliki akses ke alat digital dan kemampuan untuk beroperasi dalam lingkungan digital menjadi kunci untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Meski, sebagian besar penduduk di dunia masih menghadapi tantangan yang signifikan seperti kesenjangan digital (Febriyanto & Arisansi, 2018; Noviana et al., 2022 dalam Haniko et al., 2023). Kesenjangan digital merupakan isu yang rumit yang berasal dari berbagai faktor termasuk perbedaan ekonomi sosial, lokasi geografis, usia, ras, dan jenis kelamin (Haniko et al., 2023). Kesenjangan ini memperkuat ketidaksetaraan dengan membatasi akses ke sumber daya pendidikan, peluang pekerjaan, layanan penting, dan partisipasi masyarakat.

Teknologi informasi digunakan untuk mengumpulkan, memanipulasi, menampilkan, dan menggunakan data, telah menjadi bagian penting dari berbagai perusahaan. Untuk meningkatkan standar layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, implementasi e-government di Indonesia masih memerlukan perencanaan dalam pengimplementasiannya. Pentingnya keikutsertaan warga negara dalam tata kelola pemerintahan juga dapat memperkuat tanggung jawab, akuntabilitas, dan penyediaan layanan dalam lingkungan yang demokratis. Negara-negara industri mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah dan partisipasi aktif warga negara sebagai alat penting untuk mempertahankan struktur sosial. Meskipun, terdapat tantangan seperti kurangnya infrastruktur teknis, dana keuangan, dan kapabilitas administrasi publik, adanya inovasi dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Selain memberikan transparansi dan fasilitas yang memadai, negara-negara berkembang harus bisa memanfaatkan potensi yang luar biasa, seperti lapangan kerja, perdagangan, dan layanan yang ditawarkan oleh sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

E-Governance di Indonesia menghadapi tantangan yang terkait dengan kualitas sistem dan pelaksanaannya. Kualitas sistem e-government di Indonesia masih belum optimal dikarenakan sebagian besar profil situs web memberikan informasi yang sudah tidak relevan. Implementasi e-government di Indonesia belum berhasil memicu perubahan dalam budaya pelayanan dan etos kerja di lembaga pemerintah. Masih terdapat nilai-nilai dan budaya yang bersifat tradisional, kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, lamban, kaku, dan sulit berubah. Banyaknya lembaga pemerintah masih beroperasi dalam lingkungan birokrasi yang kuat dan cenderung menolak perubahan, sehingga tujuan implementasi e-government untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah belum tercapai. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus diimbangi dengan pembentukan pola kerja yang baru, dan mengingat bahwa e-government adalah aspek manajemen, bukan hanya teknologi.

Pengimplementasian e-government belum efektif dalam mencapai tujuan. Banyak lembaga pemerintah beranggapan bahwa dengan menerapkan e-government, kualitas layanan publik akan meningkat secara otomatis. Namun, implementasi sistem e-government seharusnya disertai dengan penyediaan layanan publik secara online, dengan tujuan utama e-government adalah mencapai transparansi, bukan hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Keterbatasan anggaran yang ketat untuk implementasi e-government juga menjadi tantangan (OECD, 2003 dalam Zidane et al., 2023). Masalahnya berkisar dari perencanaan keuangan yang tidak memadai hingga implementasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Selain itu, kualitas manajemen e-government, seperti peralatan yang rusak dan tidak terawat, kompetensi sumber daya manusia yang kurang, kurangnya orientasi pada pengguna, serta sistem yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi juga menjadi permasalahan.

b. Hambatan dan Tantangan dalam Mengatasi Kesenjangan Digital

Faktor-faktor dalam penggunaan atau implementasi E-Government di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan bagaimana E-Government harus digunakan. Kesenjangan digital yang terjadi menjadi salah satu faktor dalam mengimplementasikan E-Government itu sendiri. E-Government di Indonesia saat ini sudah menyebar luas dan semakin banyak digunakan oleh kalangan masyarakat atau pemerintahan guna untuk mempermudah proses untuk suatu kegiatan tertentu. Dalam upaya mengatasi kesenjangan digital, implementasi E-Government di Indonesia harus didukung dengan adanya penggunaan TIK yang efektif, efisien, dan aman, serta mengurangi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi E-Government di Indonesia dapat dikatakan masih memiliki banyak faktor penghambatnya, walaupun terdapat juga faktor pendukung dalam implementasinya. Main permasalahan implementasi e-government di Indonesia adalah infrastruktur, kepemimpinan, dan faktor budaya (Kumorotomo, 2009).

Indonesia dapat terbilang masih kurang memperhatikan bagaimana implementasi E-Government nya berjalan di masyarakat. Kesenjangan digital menjadi salah satu dampak dari adanya faktor penghambat pada implementasi E-Government, yaitu karena kurangnya akses internet dan infrastruktur teknologi di kalangan masyarakat. Akses internet yang tidak merata di kalangan masyarakat memunculkan adanya kesenjangan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, dimana E-Government tidak bisa digunakan secara merata sehingga ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan sistem manual yang lebih menyusahakan daripada sistem E-Government yang memudahkan. Pemerataan akses internet seharusnya menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terlebih di daerah pedesaan atau terpencil agar partisipasi masyarakat dapat merata. Lalu, pengetahuan sumber daya manusia mengenai E-Government juga menjadi penghambat dalam penggunaannya. Kapasitas sumber daya manusia yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi seperti di daerah menjadi hambatan dalam pengembangan E-government yang efektif.

Implementasi E-Government di Indonesia juga masih kurang dalam memperhatikan kebijakan regulasinya. Kebijakan mengenai E-Government di Indonesia masih kurang tegas dalam mengatur, mengelola, dan menyatakan bahwa kebijakan apa yang seharusnya dilakukan mengenai E-Government itu sendiri. Kebijakan di Indonesia dapat dikatakan masih ambigu dalam pengertiannya. Kebijakan E-Government juga dapat dikatakan masih terlalu lambat dalam merespon perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan digital. Pemerintah juga masih kurang dalam mengintegrasikan data mengenai E-Government ini, sehingga pelayanan publik juga menjadi minim dan terjadilah kesenjangan digital antar masyarakat.

Kesenjangan digital sangat mempengaruhi efektivitas berjalannya implementasi E-Government di suatu negara. Faktor-faktor penghambat yang ada sudah harus dibenahi oleh pemerintah dan difokuskan guna untuk mengatasi kesenjangan digital yang terjadi. Kesenjangan digital merupakan persoalan krusial yang menghalangi perkembangan masyarakat dan perekonomian, memperburuk ketidakesetaraan (Heliani & Elisah, 2022), serta mempersempit kesempatan bagi kelompok-kelompok marginal. Fenomena ini, yang di kenal sebagai kesenjangan digital, menjadi hambatan serius dalam upaya mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang merata. Pemerintah harus memperhatikan akses internet yang menyebar di masyarakat agar terjadi pemerataan penyebaran. Setiap sumber daya manusia yang ada di daerah atau sebagainya juga seharusnya sudah diberikan pemahaman atau pelatihan yang

lebih mendalam mengenai E-Government itu sendiri agar setiap daerah bisa memanfaatkan E-Government tanpa terkecuali. Partisipasi masyarakat dapat terbilang penting untuk memastikan apakah E-Government ini sudah berjalan dengan efektif atau tidak. Selain itu, pemerintah juga harus tegas dalam menentukan kebijakan regulasi E-Government atau memastikan hukum-hukum yang berlaku sudah sesuai dan berjalan dengan seharusnya untuk mengatur E-Government itu sendiri.

Mengatasi kesenjangan digital dan mendorong partisipasi digital yang inklusif merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kerjasama lintas sektor, pendekatan pendekatan kreatif, serta komitmen terus menerus dari berbagai pihak terkait. Upaya ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan memerlukan dedikasi berkelanjutan untuk mengintegrasikan seluruh lapisan masyarakat ke dalam era digital. Peningkatan infrastruktur, akses teknologi ke berbagai daerah, pelatihan mengenai teknologi digital, meningkatkan layanan dukungan, dan strategi atau faktor-faktor komprehensif lainnya dapat mengurangi terjadinya kesenjangan digital di masyarakat. Upaya mengatasi kesenjangan digital harus dilakukan dengan sepenuhnya karena setiap masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi.

c. Analisis Kondisi Kesenjangan Digital di Indonesia

Akses internet yang memadai menjadi hal terpenting di era globalisasi, internet dapat dikatakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat masa kini. Eksistensi dari internet telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Melalui internet masyarakat mampu melakukan komunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi dengan orang lain secara *real time* di dunia maya. Akses internet yang memadai akan menunjang kualitas hidup manusia.

Menurut Mohammad & Maulidiyah (2023), bahwa semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses dan menggunakan internet, maka kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut akan semakin baik. Dalam hal ini, akses terhadap layanan kesehatan, memperoleh informasi, pendidikan, serta peluang ekonomi akan lebih mudah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak dari akses internet yang memadai juga akan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Namun, problematika mengenai kesenjangan digital menjadi hambatan yang harus diatasi secara serius.

Kesenjangan digital memunculkan ketidaksetaraan antara masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi. Hambatan yang sering dijumpai adalah infrastruktur digital yang belum memadai atau tidak merata di wilayah pedesaan atau terpencil. Hal paling menonjol adalah kesenjangan pembangunan yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Secara realita, pembangunan infrastruktur di perkotaan jauh lebih maju dibandingkan dengan di pedesaan sehingga masyarakat pedesaan sering kesulitan dalam mengakses informasi.

Selain itu, tingkat kemampuan individu dalam mengakses teknologi juga menjadi hambatan yang memicu fenomena kesenjangan digital. Kesenjangan digital dalam suatu wilayah dapat diukur dari tingkat dan keterampilan masyarakat ketika memanfaatkan teknologi perangkat keras atau perangkat lunak (Oktavianoor, 2020). Bahkan, banyak sekali masyarakat yang masih tidak bisa membedakan informasi yang mengandung *hoax* atau tidak. Hal ini telah menunjukkan literasi digital masyarakat Indonesia yang masih kurang.

Biaya layanan internet serta pembangunan infrastruktur digital yang mahal juga menjadi tantangan dalam kesenjangan digital. Menurut laporan Index (EV-DCI) pada tahun 2023, bahwa skor daya saing digital tertinggi diraih oleh provinsi DKI Jakarta dengan jumlah skor mencapai 76,6. Selanjutnya, peringkat kedua diraih oleh provinsi Jawa Barat dengan jumlah skor 62,2, peringkat ketiga diraih oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah skor 23,3, pada peringkat paling akhir terdapat provinsi Papua Tengah dengan jumlah skor 24,9 (EV-DCI, 2024). Penyebab provinsi Papua Tengah berada di posisi terendah karena adanya pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kota yang padat penduduk di Indonesia serta provinsi di pulau Jawa menduduki posisi paling teratas. Di sisi lain, kota-kota di luar pulau Jawa juga menyaingi provinsi di Pulau Jawa. Urutan peringkat 10 provinsi tersebut yakni (1) DKI Jakarta, (2) Jawa Barat, (3) Jawa Timur, (4) DI Yogyakarta, (5) Banten, (6) Bali, (7) Kepulauan Riau, (8) Kalimantan Timur, (9) Sumatera Utara, dan (10) Jawa Tengah. EV-DCI 2024 telah menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun 2023, yakni di tahun 2023 sebesar 52,4 dan di tahun 2024 sebesar 60,4.

Jangkauan *broadband* serta konektivitas terhadap internet harus ditingkatkan. Selain itu, perlu dikembangkan kampanye dan edukasi seperti literasi digital. Menurut Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah terus menggerakkan operator telekomunikasi untuk aktif membangun infrastruktur jaringan hingga ke daerah terpencil. Pemerintah juga ikut serta dalam penyediaan jaringan *backbone* lewat proyek Palapa Ring serta satelit multifungsi Satria. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur digital tersebut diperlukan upaya yang kolaboratif antara pemerintah, pelaku bisnis, dan juga masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

SIMPULAN

Kesenjangan digital merupakan isu penting yang harus segera ditangani karena hal tersebut dapat memperkuat ketidakesetaraan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan, peluang pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi masyarakat. E-government di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan standar layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, namun pada pengimplementasiannya masih terdapat tantangan seperti kualitas sistem yang belum optimal, budaya pelayanan yang kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam implementasi e-government di Indonesia antara lain infrastruktur yang masih belum memadai, kepemimpinan yang belum optimal, faktor budaya, kurangnya akses internet dan teknologi di masyarakat, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, serta kebijakan regulasi yang kurang tegas. Salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan digital dan mendorong inklusi digital memerlukan strategi inovatif, kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, peningkatan infrastruktur, akses teknologi ke berbagai daerah, pelatihan mengenai teknologi digital, dan layanan dukungan yang memadai. Kelebihan dari e-government adalah meningkatnya transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat. Meskipun, dalam pengimplementasiannya masih memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya orientasi pada kebutuhan pengguna, sistem yang terfragmentasi, dan peralatan yang kurang terawat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah E-Government atas bimbingan dan arahannya selama proses penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada program studi Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini sebagai bagian dari pemenuhan Ujian Akhir Semester. Tidak lupa penulis menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan mahasiswa atas kerja sama dan dukungannya, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang E-government di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, A. R. N., & Najicha, F. U. (2022). Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 237-247.
- East Ventures. (2023, April 10). *East Ventures Meluncurkan East Ventures – digital competitiveness index 2023*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://east.vc/id/berita/press-release-id/east-ventures-meluncurkan-east-ventures-digital-competitiveness-index-2023>).
- Haniko, P., Sappaile, B. I., Gani, I. P., Sitopu, J. W., Junaidi, A., & Cahyono, D. (2023). Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(05), 306-315.
- Heliani, H., & Elisah, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Makroekonomi, Firm Size Terhadap Financial Distress Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 6 (4), 4142–4155. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1080>
- Indrajit, R. E. (2022). Electronic government.
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital Dan Solusi Yang Diterapkan Di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 24(2), 187-200.

- Kumorotomo, W. (2009). Kegagalan penerapan e-Government dan kegiatan tidak produktif dengan internet. Sumber:<http://Kumoro.Staff.Ugm.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2009/01/Kegagalan-Penerapan-Egov.Pdf>.
- Mohammad, W., & Maulidiyah, N. R. (2023). Pengaruh Akses Internet Terhadap Aspek Kualitas Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 211-221.
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia). *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 22(1), 1-17.
- Novita, H. Y., Nurhadryani, Y., & Wahjuni, S. (2021). Analisis Penerapan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 11(1), 1-19.
- Oktavianoor, R., Dalam, J. D., & Airlangga, S. (2020). Kesenjangan Digital Akibat Kondisi Demografis di Kalangan Masyarakat Rural Digital Gap caused by Demographic Condition among Rural Society. *Palimpsest: Journal of Information and Library Science*, 11(1), 9-57.
- Riyanto, A. D. (2024, Februari 21). *Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>
- Soomro, K.A., Kale, U., Curtis, R. *et al.* Digital divide among higher education faculty. *Int J Educ Technol High Educ* 17, 21 (2020). <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00191-5>
- Sugiono, S. (2021). Peran E-Government Dalam Membangun Society 5.0: Tinjauan Konseptual Terhadap Aspek Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(2), 115-125.
- Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya). *Journal Social Society*, 3(2), 80-94.
- Valdez, V.B., Javier, S.P. (2020). Digital Divide: From a Peripheral to a Core Issue for allSDGs. In: Leal Filho, W., Azul, A.M., Brandli, L., Lange Salvia, A., Özuyar, P.G., Wall, T. (eds) *Reduced Inequalities*. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71060-0_107-1
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 748-754.
- Zidane, B. P., Naufaldi, I. A., Iswandi, M. A., & Rizky, M. (2023). Membangun Etika Digital Sebagai Tulang Punggung E-Government Indonesia. *Kultura Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1, 27-36.